

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Bab ini merupakan kesimpulan dari seluruh penelitian yang berjudul Peranan Gerakan Mahasiswa Bandung pada Pergantian Orde Baru tahun 1998. Kesimpulan ini berdasarkan pada jawaban atas pertanyaan penelitian yang diajukan pada bab sebelumnya. Dalam kesimpulan ini peneliti mengemukakan beberapa hal sebagai berikut:

Pertama, kondisi umum pemerintahan Orde Baru di bawah pimpinan presiden Soeharto mencerminkan sebuah pemerintahan yang mengandalkan pada pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Hal ini dibuktikan dengan Rencana Pembangunan Lima Tahun yang berkesinambungan, dan senantiasa dievaluasi secara periodik. Akan tetapi pada sisi lain, Orde Baru pun memperlihatkan sikap yang tidak menyukai politik yang terlalu semarak seperti pernah terjadi pada masa pemerintahan Soekarno.

Dalam perjalanannya, Orde Baru mengeluarkan kebijakan yang berkaitan dengan peran politik masyarakat, di mana kebijakan-kebijakan tersebut sangat membatasi peran masyarakat dalam berpolitik. Untuk meminimalisir perdebatan di parlemen, Orde Baru mengeluarkan peraturan tentang penyederhanaan partai politik. Pemerintah Orde Baru pun menghadapi kelompok-kelompok masyarakat yang saat itu dianggap memiliki ideologi yang bertentangan dengan Pancasila. Maka, Orde Baru mengeluarkan pula peraturan tentang Asas Tunggal di mana seluruh kelompok masyarakat hanya boleh mencantumkan Pancasila sebagai ideologi organisasinya. Selain itu, Orde Baru juga nampak trauma dengan Peristiwa Lima Belas Januari, di mana mahasiswa tampil sebagai kelompok yang berlawanan dengan kebijakan pemerintah. Untuk mencegah terjadinya perlawanan dari kelompok mahasiswa, Orde Baru mengeluarkan peraturan tentang Normalisasi Kehidupan Kampus dan Badan Koordinasi Kemahasiswaan yang tidak menghendaki adanya aktivitas politik dalam kampus.

Kebijakan ekonomi Orde Baru menghadapi kesulitan ketika krisis melanda wilayah Asia Tenggara pada tahun 1997, di mana Indonesia pun terkena dampaknya. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat mencapai Rp 10.000 per dolar. Bahkan di awal 1998, nilai tukarnya meninggi hingga Rp. 15.000 per dolar. Dampak lain berupa PHK terjadi di berbagai perusahaan yang mengakibatkan banyak keluarga kehilangan sumber penghasilan.

Pemerintah segera merespon krisis ekonomi salah satunya dengan menandatangani perjanjian dengan IMF. Selain itu, Kabinet Pembangunan VII juga memfokuskan diri pada program-program yang bertujuan mengurangi krisis seperti Gerakan Cinta Rupiah. Akan tetapi perjanjian dengan IMF dan program-program Kabinet Pembangunan VII tidak segera mampu menuntaskan krisis yang semakin parah.

Kondisi ekonomi yang tidak terkendali ini memunculkan ketidakpercayaan di mata publik. Terlebih sebagai dampak dari pembatasan peran politik Orde Baru yang terlalu lama, krisis ekonomi merupakan momentum bagi berbagai kelompok masyarakat seperti aktivis HAM, LSM, dan juga gerakan mahasiswa untuk menyampaikan aspirasi dan tuntutan mereka akan reformasi. Dalam konteks ini, keinginan reformasi didefinisikan sebagai tuntutan Soeharto agar segera turun dari kursi kepresidenan.

Kedua, perpaduan antara krisis ekonomi dan politik memberikan kesempatan bagi gerakan mahasiswa untuk menyuarakan aspirasinya terhadap pemerintah Orde Baru. Gerakan mahasiswa yang selama masa pemerintahan Orde Baru, dibatasi aktivitasnya melalui NKK/BKK tampil sebagai salah satu kekuatan yang cukup signifikan dalam menuntut reformasi.

Gerakan mahasiswa di kota Bandung tak melewatkan momentum ini. Mereka melakukan semua kesempatan yang ada untuk menyuarakan aspirasi. Sebagai sebuah gerakan sosial, berbagai gerakan mahasiswa di Kota Bandung, baik intra maupun ekstra universitas menggunakan strategi yang cukup baik. Mereka melakukan tahap konsolidasi internal kampus pada bulan Januari dengan menggunakan krisis ekonomi sebagai isu utama. Di tahap konsolidasi internal ini, mereka bertujuan untuk ‘memanaskan suhu’ dalam kampus, agar mahasiswa-

mahasiswa lain berani bergabung pada aksi-aksi. Di tahap ini, mereka sering menggunakan mimbar bebas, penempelan poster atau spanduk sebagai metode aksi. Selain itu, beberapa gerakan mahasiswa juga mengadakan pasar murah sebagai program advokasi kepada masyarakat.

Memasuki bulan Februari di mana terjadi Sidang Umum MPR dan pelantikan Kabinet Pembangunan VII, gerakan mahasiswa di kota Bandung mulai menggunakan momen tersebut sebagai isu. Berbeda dengan tahap sebelumnya, kali ini gerakan mahasiswa Bandung mulai berani melakukan aksi turun ke jalan. Selain melakukan mimbar bebas di jalanan, gerakan mahasiswa juga berkesempatan untuk melakukan audiensi dengan otoritas setempat seperti pihak kampus maupun anggota dewan.

Ketiga, seluruh strategi yang dilakukan oleh gerakan mahasiswa kota Bandung menampakkan hasilnya. Gerakan mahasiswa kota Bandung berhasil membentuk opini publik, di mana berbagai pihak yang sebelumnya takut menyuarakan pendapatnya, mulai berani untuk berpendapat. Bahkan beberapa dosen ikut bergabung dalam demonstrasi mahasiswa dan melakukan orasi di hadapan massa aksi. Aksi mahasiswa juga mendapatkan respon dari pemerintah pusat, di mana pemerintah mulai gerah dengan berbagai demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa, dan meminta mahasiswa segera kembali ke kampus untuk berkuliah.

Demonstrasi di berbagai daerah semakin ramai setelah terjadi peristiwa penembakan mahasiswa Trisakti di Jakarta. Kejadian tersebut merupakan momen puncak bagi gerakan mahasiswa di Bandung untuk mengerahkan massa hingga 50.000 orang. Massa ini tak hanya terdiri dari mahasiswa, akan tetapi merupakan gabungan dari para seniman, pedagang hingga ibu-ibu rumah tangga. Gedung Sate dan gedung DPRD disesaki oleh massa. Ini merupakan cermin keberhasilan perjuangan yang cukup panjang dari gerakan mahasiswa untuk membentuk opini publik.

Pada akhirnya, dengan kondisi yang semakin memburuk dan tekanan dari berbagai pihak, Soeharto berhenti dari jabatannya sebagai presiden dan menyerahkan mandatnya kepada BJ. Habibie. Berhentinya Soeharto setelah 32 tahun berkuasa, merupakan buah bagi para aktivis terutama gerakan mahasiswa, sekaligus menandakan bermulanya masa reformasi di Indonesia.

5.2 Saran

Pada konteks pembelajaran di Sekolah Menengah Atas (SMA) mata pelajaran sejarah, penelitian skripsi ini dapat digunakan sebagai salah satu pembahasan materi. Jika mengacu pada Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan, materi tentang gerakan mahasiswa kota Bandung dapat diajarkan di kelas XII program Ilmu Pengetahuan Sosial dengan Standar Kompetensi (SK) Menganalisis Perjuangan Sejak Orde Baru sampai dengan masa Reformasi, dengan Kompetensi Dasar (KD) Menganalisis Proses Berakhirnya Pemerintah Orde Baru dan terjadinya Reformasi. Materi ini juga dapat disampaikan di kelas XII program Ilmu Pengetahuan Alam dengan SK Merekonstruksi Perjuangan Bangsa Indonesia sejak masa Proklamasi sampai masa Reformasi, dengan KD Merekonstruksi Perkembangan Masyarakat Indonesia pada masa Reformasi. Dan di kelas XII program Bahasa dengan SK Merekonstruksi Perjuangan Bangsa sejak masa Orde Baru sampai dengan Reformasi, dengan KD Merekonstruksi Perkembangan Masyarakat Indonesia sejak Pemerintahan Orde Baru sampai dengan masa Reformasi. Dan materi ini akan menarik bagi para siswa khususnya di wilayah Kota Bandung.

Dalam konteks penelitian yang lebih umum, penelitian ini masih sebatas gambaran umum peranan dan strategi gerakan mahasiswa kota Bandung sebagai sebuah gerakan sosial. Diharapkan dalam perkembangan selanjutnya, akan hadir penelitian yang membahas secara khusus masing-masing organisasi mahasiswa di kota Bandung, dan meneliti peranannya dalam proses pergantian Orde Baru.